

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NOMOR 15 TAHUN 2011
(STUDI PADA PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
TRANSPORTASI BUS KOTA PALEMBANG)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

Beni Putra Kusuma

NIM. 07101401003

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Bukit Besar, Palembang

Januari 2016

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NO 15 TAHUN 2011
(Studi Pada Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek
Transportasi Bus Kota Palembang)**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**

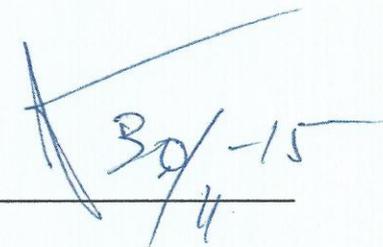
Oleh :

**BENI PUTRA KUSUMA
07101401003**

Telah disetujui oleh Pembimbing Skripsi, November 2015

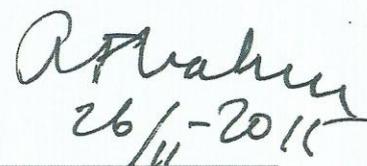
Pembimbing I

**Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.Si.
NIP. 197905012002121005**


30/11-15
/11

Pembimbing II

**Drs. Achmad Fikri Rachman
NIP. 195209301985031005**


26/11-2015
/11

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

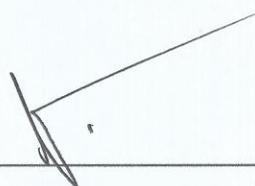
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NO 15 TAHUN 2011
(Studi Pada Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek Transportasi
Bus Kota Palembang)**

SKRIPSI

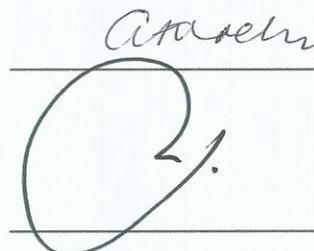
Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 24 februari 2016
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

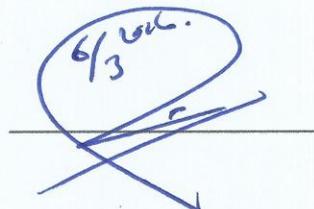
Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.Si
Ketua



Drs. Achmad Fikri Rachman
Anggota



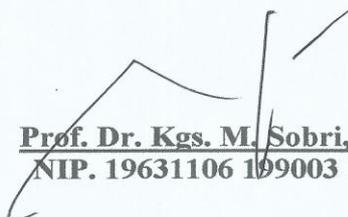
Prof. Dr. H. Slamet Widodo,MS.MM
Anggota



Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si
Anggota

Indralaya, february 2016
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 19631106 199003 1001



ABSTRAK

Beni Putra Kusuma. **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NO 15 TAHUN 2011 (STUDI PADA PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK TRANSPORTASI BUS KOTA PALEMBANG)**. Skripsi, Palembang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Sriwijaya Palembang, Januari 2016.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi di kota Palembang tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran, pelanggaran dalam bidang transportasi yakni perizinan trayek transportasi umum pada transportasi bus kota Palembang. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya fungsi Negara dan Daerah dalam menerbitkan izin penyelenggaraan transportasi orang dalam trayek berupa izin transportasi umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah kota Palembang no 15 tahun 2011 (Studi Pada Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum transportasi bus kota Palembang). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Penelitian ini dilakukan di dinas perhubungan kota Palembang, mengenai implementasi peraturan daerah kota Palembang no 15 tahun 2011 (studi pada pelaksanaan retribusi izin trayek transportasi bus kota Palembang), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Model Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dinas perhubungan kota Palembang mengimplementasikan peraturan tersebut dengan cara sosialisasi kepada para pemilik transportasi bus kota Palembang, dan memberikan sanksi bagi para pemilik transportasi yang tidak memiliki izin trayek transportasi bus kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa implementasi peraturan daerah kota Palembang no 15 tahun 2011 studi pada pelaksanaan retribusi izin trayek transportasi bus kota Palembang oleh dinas perhubungan kota Palembang sudah berjalan cukup baik, dan bisa dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek Transportasi Bus Kota Palembang, Model George C. Edward III*

Pembimbing I



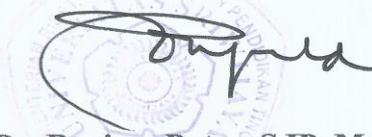
Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.Si.
NIP. 197905012002121005

Pembimbing II



Drs. Achmad Fikri Rachman
NIP. 195209301985031005

Palembang, 24 februari 2016
Ketua Jurusan Administrasi Negara



Dr. Raniasa Putra, S.IP.,M.Si.
NIP. 197805122002121003

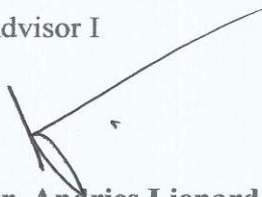
ABSTRACT

Beni Putra Kusuma. **IMPLEMENTATION OF CITY PALEMBANG REGULATION NO 15 OF 2011 (STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF LEVY ROUTE PERMITS CITY BUS TRANSPORTATION PALEMBANG)**. Thesis, Palembang: Faculty of Social and Political Sciences, University of Sriwijaya Palembang, January 2016.

This research was motivated by the traffic activity is high enough in the city of Palembang did not rule out the occurrence of violations, violations in the field of transport that is licensing the route of public transport in the city of Palembang bus transportation. This shows yet fulfilled the function of the State and the Regions in issuing an operating license for the transportation of persons in the stretch form of public transport permits. The purpose of this study was to determine how the implementation of the city of Palembang local regulations No. 15 of 2011 (A Study on Implementation of Public Transport Permits Route Palembang city bus transport). This study used descriptive qualitative research was done in the transportation department city of Palembang, on the implementation of local regulations the city of Palembang No. 15 of 2011 (the study on the implementation of the levy route permits bus transportation city of Palembang), data collection techniques used were interviews, observation, and dokumentas. Data analysis technique used is Model Miles and Huberman. From the research carried out showed that Palembang city transportation agencies to implement these regulations by means of socialization to the owners of Palembang city bus transportation, and provide penalties for the owners of transport which do not have bus transportation route permits the city of Palembang. Based on the results obtained the conclusion that the implementation of the city of Palembang local regulations No. 15 of 2011 a study on the implementation of the levy bus transport route permits by the city of Palembang Palembang city transportation department has been running quite well, and can be carried back the following year.

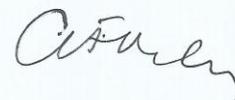
Keywords: *Implementation of Transportation Bus Route Permits Palembang, Model George C. Edward III*

Advisor I



Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.Si.
NIP. 197905012002121005

Advisor II



Drs. Achmad Fikri Rachman
NIP. 195209301985031005

Palembang, 24 February 2016
Chairman of the State Administration Department



Dr. Raniasa Putra, S.IP.,M.Si.
NIP. 197805122002121003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beni Putra Kusuma

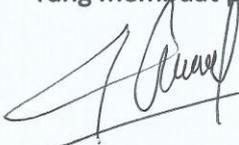
NIM : 07101401003

Program Studi : Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 15 Tahun 2011 (Studi Pada Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek Transportasi Bus Kota Palembang)” ini beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang di temukan dalam skripsi ini dan/atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang di jatuhkan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Mei 2016
Yang membuat pernyataan


Beni Putra Kusuma
NIM : 07101401003



LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO :

“KECERDASAN BUKANLAH TOLAK UKUR KESUKSESAN, TETAPI
DENGAN MENJADI CERDAS KITA BISA MENGGAPAI KESUKSESAN”

(BENI PUTRA KUSUMA)

ATAS RAHMAT ALLAH SWT,

KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI

KEPADA :

- ❖ KEDUA ORANG TUAKU,
AYAHANDA SUROSO & IBUNDA
AMBAR
- ❖ KAKAKKU MUHAMAD NURHUDA
- ❖ SAHABAT-SAHABATKU, DAN
- ❖ ALMAMATER KEBANGGAANKU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 15 Tahun 2011 (Studi Pada Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek Transportasi Bus Kota Palembang) sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran, bimbingan, bantuan, dukungan, dan do'a dari berbagai pihak. Dengan segala ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Seluruh keluarga besarku terutama Bapak dan Ibu serta kakakku terima kasih telah mendo'akan aku dalam setiap langkah hidupku, dan bantuan serta dukungannya baik moril maupun materil selama ini khususnya selama pengetikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Kgs. M Sobri. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan bagi para mahasiswa ataupun mahasiswi.
4. Bapak Dr. Raniasa Putra M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kontribusi besar berupa masukan dan wawasan yang telah diberikan.
5. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan semangat.

6. Bapak Dr. andries lionardo, S.IP., M.Si., sebagai pembimbing I yang telah memberikan semangat dan dorongan serta pembimbing skripsi, sehingga skripsi dapat tersusun dengan baik.
7. Bapak Drs. A. Fikri Rachman selaku Ketua Program kampus bukit Fisip Unsri dan pembimbing II yang telah memberikan semangat dan dorongan, memberikan banyak masukan buat saya, dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM selaku dosen penguji ujian seminar dan komprehensif yang telah memberikan masukan saran, kritik, dan bimbingan.
9. Bapak Sofyan Effendi, S.IP. M.Si selaku dosen penguji ujian seminar dan komprehensif yang telah memberikan masukan saran, kritik, dan bimbingan.
10. Segenap dosen yang telah memberikan ilmu yang akan sangat berguna suatu saat nanti dan seluruh Staf Administrasi yang telah membantu selama ini.
11. Bapak Sulaiman Amin selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang dan seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Palembang yang sudah membantu selama penelitian.
12. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara angkatan 2010, dan teman-teman dari angkatan 2011, serta seluruh anggota dari komunitas futsal fisip (KFF) maupun dari anggota FFC yang selalu mendukung dalam penulisan skripsi.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Semua tidak lain karna keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia biasa. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk memperbaiki

kesalahan kesalahan tersebut. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dengan segala kekurangan dan kelebihanannya.

Palembang, Februari 24 2016



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kebijakan Publik	15
C. Pengertian Implementasi Kebijakan	17
D. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan	19
E. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	23
F. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan.....	25
G. Pengertian Tentang Peraturan Daerah.....	27
H. Mekanisme Proses Penyusunan Peraturan Daerah	29
I. Peraturan Daerah Kota Palembang No 15 Tahun 2011	30
J. Retribusi Izin Trayek.....	32
K. Perbandingan Teori Implementasi Kebijakan.....	34
L. Teori yang di gunakan dan alasan memilih teori.....	49
M. Kerangka Pemikiran	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Aspek Penelitian.....	53
C. Fokus Penelitian	54

D. Definisi Konsep.....	56
E. Data dan Sumber Data.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	61
A. Sejarah Singkat.....	61
B. Struktur Organisasi, Pembagian Tugas Dan Wewenang.....	63
C. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang	69
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	70
A. Komunikasi	70
B. Sumberdaya	79
C. Disposisi	90
D. Struktur Birokrasi.....	93
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kendaraan Bus Kota Berdasarkan Trayek Tahun 2013.....	6
2. Jumlah Izin Trayek Yang Telah Dikeluarkan DISHUB Kota Palembang.....	7
3. Jumlah Bus Kota Berdasarkan Jurusan Dan Kepemilikan Tahun 2014	8
4. Penelitian Terdahulu.....	12
5. Ukuran Keberhasilan Dan Indikator.....	50
6. Fokus Penelitian	54
7. Besarnya tarif retribusi izin trayek angkutan jalan.....	76
8. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	80
9. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	81
10. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	81
11. Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Palembang	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.	Model Van Meter dan Van Horn	39
2.	Model George C Edward III	49
3.	Kerangka Pemikiran.....	52
4.	Struktur Organisasi.....	64
5.	Dokumentasi Penulis di Lapangan.....	73
6.	Website Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
3. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
4. Hasil Seminar Proposal Tanggal 21 April 2015
5. Izin Pengambilan Data Dari FISIP UNSRI Kampus Palembang
6. Izin Pengambilan Data Dari Dinas Perhubungan Kota Palembang
7. Surat Pengantar Dari Kesbangpol Provinsi Sumatra Selatan
8. Peraturan Daerah Kota Palembang No 15 Tahun 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor transportasi memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan barang dan jasa. Tidak hanya itu saja, transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan negara serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal ini tercermin semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok tanah air hingga luar negeri. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi baru berkembang sebagai upaya peningkatan pemerataan pembangunan.

Peranan transportasi yang semakin vital, maka transportasi jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan transportasi yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Lalu lintas dan transportasi jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan moda transportasi lain.

Pengembangan lalu lintas dan transportasi jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara tetap, serasi, seimbang, terpadu dan sinergi antara yang satu dengan lainnya.

Peranan transportasi jalan yang memiliki nilai penting dan strategis karena menguasai hajat hidup orang banyak atau masyarakat yang bergantung pada kebutuhan transportasi jalan raya, sehingga pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam mengelola dan mengatur tentang permasalahan transportasi termasuk transportasi jalan raya, maka transportasi jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dalam pengembangannya juga melibatkan pihak swasta. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan. “cabang-cabang produksi penting bagi masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Kebutuhan akan adanya transportasi, pemerintah mempunyai peran sebagai pembina, sehingga berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi perwujudan transportasi dan jaringan pelayanan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Pasal 1 Tahun 1993 perusahaan transportasi umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa transportasi orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan. transportasi bus kegiatan usahanya menurut pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

1993 yang menyebutkan kegiatan usaha transportasi orang atau barang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Nasional, Koperasi, Perorangan warga Indonesia. Setiap transportasi umum yang beroperasi di kota Palembang ataupun kota lainnya di Indonesia membutuhkan trayek dan jaringan trayek, Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa transportasi orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Sedangkan yang dimaksud dengan jaringan trayek adalah merupakan kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan transportasi orang.

Menurut Frank H. Wood Ward ada 3 jenis transportasi, yaitu:

1. Transportasi Darat
2. Transportasi laut
3. Transportasi Udara

Pada saat ini transportasi darat lebih memegang peranan penting dalam masyarakat karena selain murah tarifnya, dapat dijangkau pengguna jasa juga mudah digunakan.

Ada dua jenis transportasi darat, yaitu:

1. Transportasi darat diatas jalan raya diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992
2. Transportasi diatas rel kereta api diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992

Transportasi kota (bus perkotaan) adalah sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat kota dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan kota

pada umumnya. Keberadaan transportasi kota sangat dibutuhkan tetapi apabila tidak ditangani dengan baik dan benar akan menjadi masalah bagi kehidupan masyarakat kota.

Permasalahan-permasalahan secara umum yang dihadapi transportasi perkotaan antara lain:

1. Pertumbuhan kebutuhan transportasi sering tidak seimbang dengan penyedia prasarana.
2. Kualitas dan jumlah transportasi umum yang belum memadai sarana dan prasarana, jaringan jalan dan jaringan trayek, terminal, sistem pengendalian dan pelayanan transportasi umum belum berhasil ditata secara konseptual.
3. Makin jauhnya jarak perjalanan harian masyarakat.
4. Penggunaan kendaraan pribadi yang kurang efisien.
5. Di daerah perkotaan timbul kemacetan, kesemrawutan, dan pencemaran lingkungan.

Tentang keberadaan transportasi umum termasuk transportasi bus perkotaan diatur pemerintah melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 dan keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Nomor 274 / lik.105/DPRD / Tahun 1996 yang memuat tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Tetapi adanya peraturan tersebut tentu saja belum mampu mengimbangi banyaknya transportasi bus perkotaan beserta masalah-masalahnya sehingga pemerintah mengeluarkan keputusan yang mengatur tentang penyelenggaraan transportasi orang di jalan dengan kendaraan umum yaitu dengan peraturan daerah kota Palembang no 15 tahun 2011 tentang retribusi izin trayek. Sehingga perusahaan

mobil bus umum dalam peranannya yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas harus dijalankan sesuai izin trayek yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Palembang merupakan ibu kota di Propinsi sumatra selatan yang memiliki karakteristik lalu lintas dimana hanya merupakan awal dan akhir dari suatu perjalanan. Pada saat ini aktivitas masyarakat sedang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan peningkatan intensitas mobilitas perjalanan orang dari dan ke tujuan kegiatan.

Dinas Perhubungan kota palembang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu yang menjadi tugas dari Dinas Perhubungan kota palembang adalah berwenang dalam menerbitkan izin penyelenggaraan transportasi orang dalam trayek berupa izin transportasi umum.

Berkaitan dengan izin trayek, adanya aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi di kota palembang tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Salah satu yang disorot adalah pelanggaran dalam bidang transportasi yakni perizinan trayek transportasi umum pada transportasi bus kota palembang.

Sebagaimana informasi yang didapatkan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, Masih banyak transportasi bus kota tak layak jalan di Kota Palembang memaksakan diri beroperasi, dari hasil razia yang dilakukan Dishub (Dinas Perhubungan) bersama dengan Polresta Palembang didapati sebanyak 30 bus kota yang tak layak jalan. Bus kota yang tidak layak jalan ini kebanyakan

izin trayeknya sudah mati, selain itu bus-bus tersebut kondisinya sebagian sudah rusak fisik, tanpa lampu sien, lampu utama dan bodi ditemplei stiker.

Hal ini telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Palembang agar setiap tahun terjadi pengurangan transportasi bus kota yang tidak layak operasi dan tidak lagi diterbitkan izin trayek. Berdasarkan Perda Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi, maka izin operasional transportasi umum khususnya bus kota hanya sebatas 10 tahun.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Masripin, pada tahun 2013 terdapat 120 unit armada bus kota yang beroperasi di kota Palembang yang memiliki izin, berikut adalah data tabel yang telah diperoleh dari dinas perhubungan kota Palembang, data tahun 2013:

Tabel: 1
JUMLAH KENDARAAN BUS KOTA BERDASARKAN TRAYEK
TAHUN 2013

NO	JENIS KENDARAAN	TRAYEK	JUMLAH (UNIT)
1	Bus Sedang / Bus Kota	Plaju – Perumnas	11
2	Bus Sedang / Bus Kota	Bukit Besar – Jaka Baring	1
3	Bus Sedang / Bus Kota	Plaju – Pusri	12
4	Bus Sedang / Bus Kota	Plaju – Terminal AAL	34
5	Bus Sedang / Bus Kota	Terminal KJ – Terminal AAL	47
6	Bus Sedang / Bus Kota	Terminal KJ – Perumnas	9
7	Bus Sedang / Bus Kota	Terminal KJ – Pusri	6
	JUMLAH		120

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2013.

Di dalam tabel tersebut di jelaskan bahwa tahun 2013 terdapat 120 unit transportasi bus kota yang memiliki izin trayek, dari berbagai jalur trayek yang telah di sediakan oleh dinas perhubungan kota Palembang, yaitu jalur trayek plaju-perumnas sebanyak 11 unit bus kota, kemudian bukit besar-jaka baring 1 unit bus kota, plaju-pusri 12 bus kota, plaju-terminal alang-alang lebar 34 bus

kota, terminal karya jaya-terminal alang-alang lebar 47 bus kota , terminal karya jaya-perumnas 9 bus kota, dan terminal karya jaya-pusri berjumlah 6 bus kota, data berdasarkan tahun 2013.

Pada tahun ini tahun 2014 izin rayek yang telah di berikan sebanyak 101 unit armada bus kota. Namun di lapangan, masih ada sekitar 200 bus kota yang beroperasi. Menurut dinas perhubungan penertiban akan terus dilakukan secara insentif, jika ditemukan bus kota yang tak layak operasi dan masih mengangkut penumpang langsung di kandangkan. Pada tahun 2014 izin trayek sebanyak 19 unit bus kota tidak lagi di perpanjang, karena tak layak lagi untuk operasional, dinas perhubungan hanya memberi izin trayek 101 unit bus kota tahun 2014 yang terdiri dari berbagai jalur trayek yang telah di sediakan oleh dinas perhubunga kota Palembang yaitu sebagai berikut: jalur trayek plaju-perumnas sebanyak 6 unit bus kota, kemudian bukit besar-jaka baring 1 unit bus kota, plaju-pusri 9 bus kota, plaju-terminal alang-alang lebar 30 bus kota, terminal karya jaya-terminal alang-alang lebar 42, terminal karya jaya-perumnas 7, dan terminal karya jaya-pusri berjumlah 6 bus kota, data berdasarkan tahun 2014.

Berikut ini lebih lengkapnya data yang telah di peroleh langsung dari dinas perhubungan (DISHUB) Kota Palembang mengenai izin trayek yang di keluarkan dari bulan januari 2014 sampai bulan juni 2014 dan jumlah bus kota berdasarkan jurusan dan kepemilikan (PO) tahun 2014:

Tabel: 2
JUMLAH IZIN TRAYEK YANG TELAH DI KELUARKAN DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG(MELALUI KPPT)
TAHUN 2014

NO	JENIS KENDARAAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUMLAH
1	ANGKOT	126	81	124	130	0	119	580
	-Perpanjang	84	62	88	110		97	371
	-Baru/Daftar ulang	42	19	36	20		92	209
2	BUS KOTA	99	7	12	8	0	9	135

	-Perpanjang	74	7	12	8		0	101
	-Baru/Daftar ulang	25	0	0	0		9	34
3	SEDAN TAXI	27	5	10	6	0	100	148
	-Perpanjang	27	5	10	5		1	48
	-Baru/Daftar ulang	0	0	0	1		99	100
JUMLAH		252	93	146	144	0	228	863

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2014

Tabel: 3
JUMLAH BUS KOTA BERDASARKAN JURUSAN DAN KEPEMILIKAN(PO)
TAHUN 2014

No	PO	PLJ- P.NAS	BBS- JK.BRING	PLJ- PUSRI	PLJ-K.12	TKJ-K.12	TKJ- P.NAS	TKJ- PUSRI	JUMLAH
1	DIKATARA	-	-	1	2	1	-	-	4
2	MANCANEGARA	-	-	-	2	-	-	-	2
3	JAYABERSAMA	1	1	-	-	5	-	1	8
4	KOPASS	-	-	2	2	6	-	-	10
5	WIRADHARMA	1	-	-	-	-	-	-	1
6	S.TRANSPORT	-	-	-	8	12	-	-	20
7	KARYAJAYA	2	-	2	11	6	-	3	24
8	BARI	2	-	4	3	4	1	2	16
9	WAHANA UTAMA	-	-	-	-	-	6	-	6
10	MUTIARA PUTRA	-	-	-		7	-	-	7
11	PRATAMA KARYA	-	-	-	2	1	-	-	3
JUMLAH		6	1	9	30	42	7	6	101

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2014.

Peraturan Daerah kota Palembang No 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan angkutan penumpang umum harus dilengkapi dengan izin trayek”. Dan berikutnya menyebutkan “izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku”. Dalam pelaksanaannya masih banyak menuai masalah diantaranya yaitu:

1. Ada transportasi bus kota di Palembang yang memiliki izin trayek, namun transportasi bus kota tersebut tidak layak lagi dioperasikan.
2. Adanya transportasi bus kota yang tidak layak beroperasi, tetapi sebelumnya sudah memiliki izin trayek, sehingga menyebabkan peningkatan polusi

udara di kota Palembang, karena emisi gas buang kendaraan tak layak, hal itu sangat berperan dalam menyumbang pencemaran.

3. Disinyalir masih puluhan transportasi bus kota tak layak beroperasi masih melayani penumpang tanpa izin trayek.
4. Dengan masih banyaknya transportasi bus kota yang mendapatkan izin trayek membuat jalan di kota Palembang mengalami kemacetan karena kurang disiplinnya para pengemudi transportasi bus kota tersebut, ditambah lagi bus yang tidak memiliki izin trayek masih melayani penumpang atau masih beroperasi.

Dari permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan kota Palembang mempunyai peran yang cukup penting untuk menertibkan kembali permasalahan pelanggaran perizinan transportasi umum khususnya transportasi bus kota. Tertibnya masyarakat dalam bidang perizinan transportasi umum dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Dinas Perhubungan kota Palembang sebagai penggerak roda pemerintahan.

Adanya perizinan transportasi umum kota Palembang adalah untuk memberikan kepastian hukum dan hak bagi pemilik transportasi umum kota Palembang agar dapat mengoperasikan kendaraannya. Selain itu, tertibnya perizinan transportasi kota Palembang dapat memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penting bagi Dinas Perhubungan untuk mengatur pemilik transportasi umum kota Palembang agar melakukan perpanjangan izin trayek yang telah habis masa berlakunya.

Berdasarkan kasus diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian. Adapun judul penelitian yang ingin peneliti teliti adalah:

“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 15 Tahun 2011 (Studi Pada Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek Transportasi Bus Kota Palembang)”.

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat memudahkan penelitian dan supaya peneliti dapat terarah dalam mengintrepetasikan fakta dan data dalam pembahasannya. Masalah merupakan bagian pokok dari suatu kegiatan penelitian dimana penulis mengajukan pertanyaan terhadap dirinya tentang hal hal yang akan dicari jawabnya melalui kegiatan penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah Implementasi peraturan daerah kota palembang no 15 tahun 2011 tentang retribusi izin trayek angkutan umum transportasi bus kota palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sejauh mana penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau menjadi tujuan penelitian. Dengan kata lain tujuan penelitian adalah untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesimpangsiuran. Adapun Tujuan operasional yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah apa saja atau hambatan hambatan apa saja yang timbul pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 15 Tahun 2011 (Studi Pada Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum transportasi bus kota palembang). Tujuan Fungsional dari penelitian ini yaitu agar hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh instansi

sebagai referensi dasar untuk mengambil kebijakan/keputusan yang berhubungan dengan implementasi retribusi izin trayek transportasi umum. Tujuan Individual adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan pengamatan terhadap implementasi retribusi izin trayek transportasi umum transportasi bus kotapalembang, sehingga penulis melakukan penelitian untuk melengkapi tugas akhir kuliah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat secara ilmiah, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta mengembangkan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah dibidang ilmu sosial.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dapat memberikan masukan bagi instansi terkait demi peningkatan pelaksanaan program.
3. Manfaat secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan Departemen Ilmu Administrasi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Juliansyah Noor. 2011. *Metode Penelitian*. Kencana: Jakarta.

Harbani Pasolong. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. Alfabeta: Bandung.

Dwiloka, Bambang & Riana, Rati. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. PT Rineka Cipta: Jakarta.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Eko Sugiarto. 2013. *EYD untuk pelajar dan mahasiswa*. suaka media, niten RT 05/RW 30,wedomartani,ngemplak, sleman, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundangan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek.

3. Elektronik

<http://www.sumeks.co.id>

<http://palembang.tribunnews.com>

<http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/447.pdf>

<http://www.dishub.palembang.go.id>